

# **BAB I**

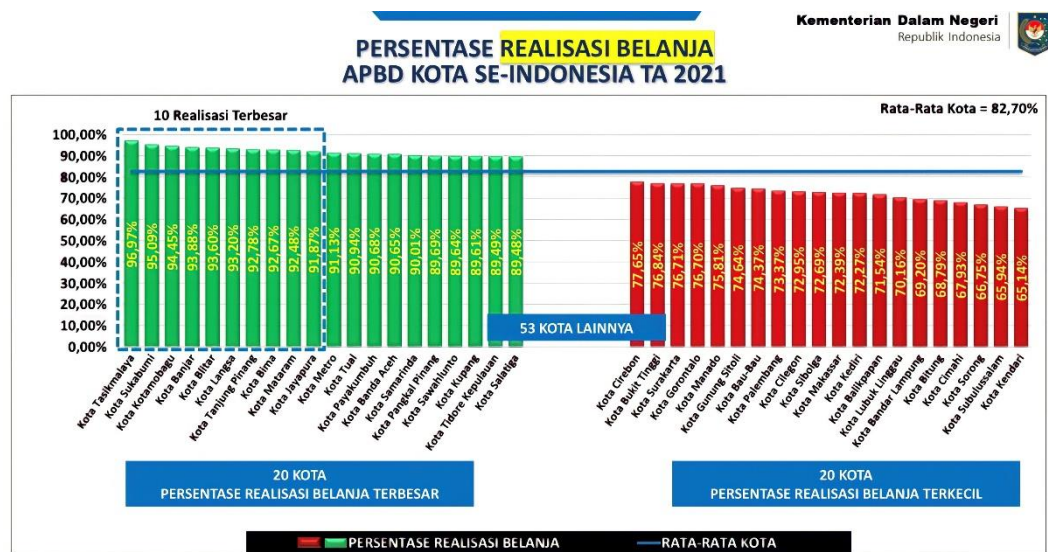
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang merupakan akumulasi dari realisasi anggaran yang dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyerapan anggaran merupakan salah satu tolok ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian di suatu negara. Menurut Halim (2014: 84), penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Secara sederhana, masyarakat umum menyebut penyerapan anggaran sebagai pencairan anggaran.

Penyerapan anggaran yang baik dapat dilihat dari tingkat pelaksanaan realisasi fisik dan realisasi anggaran yang terjadwal sesuai dengan rencana kerja selama satu periode tahun anggaran (Oktaliza *et al.*, 2020). Berdasarkan data Pemutakhiran Laporan 93 Pemkot, Ditjen Bina Keuangan Daerah 2022 dalam webinar pada tanggal 31 Januari 2022 dapat dilihat bahwa Kota Palembang serapan anggarannya masih rendah yaitu 73,37 %. Serapan anggaran yang baik harusnya diatas *base line* rata-rata serapan nasional, pada tahun 2020 rata-rata serapan nasional sebesar 82,69 % dan pada tahun 2021 sebesar 85,69 %. Hal ini bisa dilihat kalau tingkat serapan anggaran nasional meningkat. Akan tetapi kota Palembang serapan anggarannya sebesar 73,37 % yang berarti dibawah rata-rata serapan nasional.

Kota Palembang termasuk salah satu dari 20 kota dengan persentase realisasi belanja terkecil, hal ini bisa dilihat pada gambar 1 yang menunjukkan persentase serapan anggaran Kota Palembang sebesar 73,37 %.



Sumber: Pemutakhiran Laporan 93 Pemkot (Data Diolah), Ditjen Bina Keuangan Daerah 2022

**Gambar 1.1**  
**Persentase Realisasi Belanja APBD Kota Se-Indonesia TA 2021**

Salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran ialah perencanaan anggaran yang menjadi acuan dalam proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu (Zarinah, 2015). Perencanaan anggaran adalah sebuah rencana yang dibuat dan juga disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan untuk periode dan jangka waktu tertentu di masa mendatang. Hasil penelitian Oktaliza *et al.*, (2020) menyatakan bahwa perencanaan anggaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyerapan anggaran karena perencanaan anggaran memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan anggaran. Pernyataan ini juga mendukung hasil penelitian Sudasri (2010) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran dan semakin baik perencanaan anggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, maka semakin tinggi pula tingkat penyerapan anggaran.

Sukadi (2012) mengungkapkan bahwa sebesar 73,50 persen serapan anggaran dipengaruhi oleh empat faktor, salah satunya yaitu pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan, dan pengesahan anggaran oleh

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran adalah tahap yang mana sumber daya manusia digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi bahwa anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat (Widodo: 2018). Penyerapan anggaran yang baik dapat dilihat dari tingkat pelaksanaan realisasi fisik dan realisasi anggaran yang terjadwal sesuai dengan rencana kerja selama satu periode tahun anggaran Oktaliza *et al* (2020). Pernyataan ini didukung oleh Makmur Marlina (2021), bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Jika pelaksanaan anggaran dilakukan dengan baik, maka dan akan menghasilkan penyerapan anggaran yang baik pula.

Secara umum pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Dalam hal ini proses yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasil Penelitian Tofani *et al.*, (2020) menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Putri (2014) menyatakan bahwa serapan anggaran OPD dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, dokumen pengadaan, dan uang persediaan. Didalam organisasi, sumber daya manusia merupakan kunci utama bagi pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan sebaik mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada organisasi Sutrisno (2011). Kompetensi Sumber Daya Manusia menurut Armstrong

dan Baron (dalam Wibowo, 2007: 88) merupakan dimensi perilaku yang berada di belakang kinerja kompetensi. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam lingkungan pekerjaannya. Tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentu ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengembangan Sumber Daya Manusia Wati *et al.*, (2015).

Komitmen organisasi berkaitan dengan penyerapan dan kinerja anggaran. Komitmen yang tinggi dari pegawai anggaran sangat diperlukan dalam pelaksanaan anggaran terkait pengadaan barang/jasa agar anggaran yang tersedia dapat terserap secara maksimal. Menurut Cooper (2006), komitmen organisasi adalah keterlibatan pegawai dalam mempertahankan perilaku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu komitmen organisasi dapat mempengaruhi penyerapan anggaran dan kinerja. Komitmen organisasi adalah perasaan keterkaitan atau keterikatan psikologis dan fisik pegawai terhadap organisasi tempat ia bekerja atau organisasi dimana ia menjadi anggotanya. Keterkaitan psikologis artinya pegawai merasa senang dan bangga bekerja untuk atau menjadi anggota organisasi. Keterkaitan atau keterikatan tersebut mempunyai tiga bentuk mematuhi norma, nilai-nilai dan peraturan organisasi, mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan internalisasi norma, nilai-nilai dan peraturan organisasi (Wirawan 2013:713).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang serapan anggaran pada OPD-OPD Pemerintah Kota Palembang. Dalam hal ini, penulis menyoroti beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran; perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, dan komitmen organisasi. Penulis ingin mengetahui apakah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di OPD Pemerintah Kota Palembang. Oleh karena itu, penelitian dalam bentuk skripsi ini diberi judul

“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang?
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang?
4. Bagaimana pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang?
5. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang?
6. Bagaimana pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, dan komitmen organisasi secara bersama-sama terhadap penyerapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini memiliki batasan masalah yang akan diteliti. *Batasan pertama*, faktor yang diujikan terdiri atas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi SDM, pengadaan barang dan jasa, dan komitmen organisasi. *Batasan kedua*, yaitu ruang lingkup pembahasan pada OPD Pemerintah Kota Palembang. Informasi/data sesuai periode penelitian dari Maret-Juni 2022.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang.
5. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang.
6. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, dan komitmen organisasi secara bersama-sama terhadap penyerapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. **Manfaat Teoritis**  
Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan referensi dan menambah pengetahuan/wawasan bagi pembaca khususnya bagi peneliti selanjutnya.
2. **Manfaat Praktis**  
Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan OPD di Kota Palembang lebih memperhatikan lagi anggaran yang ada agar tidak terjadi penyerapan anggaran yang rendah.